

Peran Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Lokal Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Nusa Tenggara Barat



Dayu Rustam ^{1,*}, Winda Putri ², Nur Islamiah ³

^{1, 2, 3} Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Al Azhar Mataram, Mataram, Indonesia

* Corresponding author email: dayurustam66@gmail.com

ABSTRACT

Wisata halal merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi daerah yang mengedepankan nilai-nilai Islam dalam pelayanan dan fasilitas pariwisata. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya Pulau Lombok, telah mengembangkan konsep wisata halal sebagai identitas dan daya tarik utama untuk menarik wisatawan domestik dan mancanegara, terutama yang berasal dari negara berpenduduk mayoritas Muslim. Pengembangan wisata halal tidak hanya berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga berimplikasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kontribusi wisata halal terhadap peningkatan pendapatan daerah, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2025. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang menelaah berbagai literatur akademik dan kebijakan pemerintah terkait pengembangan wisata halal. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun memiliki potensi besar, pengembangan wisata halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi pelaku usaha terhadap standar halal, dan implementasi kebijakan yang belum maksimal. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM), dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi wisata halal sebagai instrumen pembangunan ekonomi berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Article History

Received 2025-05-28

Revised 2025-06-09

Accepted 2025-06-12

Keywords

Wisata Halal,
UMKM,
Ekonomi Lokal

Copyright © 2025, The Author(s)

This is an open-access article under the CC-BY-SA license



PENDAHULUAN

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya Pulau Lombok, telah dikenal sebagai destinasi wisata halal terkemuka di Indonesia. Pengakuan ini diperkuat dengan berbagai penghargaan internasional, seperti World's Best Halal Honeymoon Destination dan World's Best Halal Tourism Destination yang diraih pada ajang World Halal Tourism Awards 2015 di Uni Emirat Arab. Hal ini menunjukkan pengakuan dunia terhadap potensi besar wisata halal yang dimiliki oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tidak hanya sebagai pengakuan formal, penghargaan ini juga menjadi titik tolak dalam memperkuat identitas NTB sebagai destinasi unggulan pariwisata berbasis nilai-nilai Islam (Kementerian Pariwisata, 2016).

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah merespons pengakuan tersebut dengan serius melalui berbagai kebijakan strategis. Salah satu langkah penting adalah dikeluarkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. Kebijakan ini menjadi dasar hukum bagi pengembangan sektor pariwisata halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang mencakup penyediaan fasilitas ramah Muslim, seperti hotel syariah, restoran bersertifikasi halal, masjid atau musala di area wisata, serta layanan transportasi yang mendukung kebutuhan wisatawan Muslim. Melalui Perda ini, Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan komitmennya untuk menjadikan wisata halal sebagai pilar utama dalam pembangunan daerah (Pemprov NTB, 2016).

Konsep wisata halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat bukan hanya tentang menyediakan makanan dan minuman halal semata, tetapi juga mencakup penyediaan layanan yang sesuai dengan syariat Islam, seperti akomodasi yang ramah keluarga, aktivitas wisata yang sesuai dengan prinsip moral, serta lingkungan yang mendukung pelaksanaan ibadah. Dengan demikian, wisata halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat diharapkan mampu menciptakan pengalaman wisata yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi wisatawan Muslim, baik domestik maupun mancanegara (Huda & Pratiwi, 2022).

Selain memperkuat identitas budaya lokal, pengembangan wisata halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sektor pariwisata diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan menciptakan lapangan kerja, mendorong tumbuhnya Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM), serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Data dari Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB provinsi mencapai lebih dari 15% pada tahun 2022, dengan potensi terus meningkat seiring pertumbuhan wisata halal (Dispar NTB, 2022).

Keberhasilan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mengembangkan wisata halal tidak lepas dari peran aktif masyarakat lokal, khususnya para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM). Mereka terlibat dalam berbagai sektor pendukung pariwisata, seperti kuliner halal, kerajinan tangan bernuansa Islami, penyediaan oleh-oleh khas, hingga layanan transportasi dan pemandu wisata. Hal ini menunjukkan adanya sinergi yang baik antara kebijakan pemerintah dengan inisiatif masyarakat dalam mendukung pariwisata halal sebagai sumber ekonomi baru (Mudin & Huda, 2023).

Meskipun memiliki potensi besar, pengembangan wisata halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak terlepas dari berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan infrastruktur pendukung, rendahnya pemahaman masyarakat lokal terkait standar layanan halal, serta keterbatasan akses pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) terhadap sertifikasi halal. Tantangan ini perlu diatasi melalui program pembinaan, pelatihan, dan kemudahan akses sertifikasi agar kualitas layanan dan produk yang ditawarkan sesuai dengan ekspektasi wisatawan Muslim (Zitri et al., 2023).

Selain itu, keberhasilan wisata halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat juga dipengaruhi oleh promosi yang efektif, baik di tingkat nasional maupun internasional. Branding sebagai "The World's Best Halal Tourism Destination" perlu terus diperkuat melalui kampanye pemasaran digital, partisipasi dalam pameran wisata halal global, serta kolaborasi dengan agen perjalanan dan platform digital. Tanpa upaya promosi yang konsisten, potensi besar Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam wisata halal akan sulit dikenal secara luas dan dioptimalkan dengan baik (Silalahi et al., 2023).

Dukungan infrastruktur menjadi elemen penting dalam mendukung keberhasilan wisata halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pengembangan bandara internasional yang ramah Muslim, perbaikan akses jalan menuju destinasi wisata, serta penyediaan fasilitas publik yang sesuai dengan standar halal menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah diharapkan mampu bekerja sama dengan pemerintah pusat dan pihak swasta untuk memastikan tersedianya infrastruktur yang memadai, sehingga pengalaman wisatawan di Provinsi Nusa Tenggara Barat semakin berkualitas dan berkesan (Nasution et al., 2023).

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, pengembangan wisata halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan baru, dan mendorong pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM). Wisata halal tidak hanya menjadi peluang bisnis, tetapi juga sebagai sarana pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Keberhasilan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mengembangkan wisata halal diharapkan menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia dalam mengoptimalkan potensi ekonomi berbasis pariwisata (Kemenag RI, 2023).

Oleh karena itu, pengembangan wisata halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu dilakukan secara terintegrasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat. Sinergi ini penting untuk menciptakan ekosistem pariwisata halal yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing global. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang tepat, Provinsi Nusa

Tenggara Barat berpotensi menjadi model pengembangan wisata halal yang sukses di tingkat nasional maupun internasional.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Wisata Halal

Wisata halal merupakan suatu bentuk layanan pariwisata yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam, mencakup penyediaan makanan halal, fasilitas ibadah, serta lingkungan yang mendukung nilai-nilai Islam seperti larangan alkohol dan aktivitas non-halal (Battour & Ismail, 2016). Wisata halal juga mencakup aspek non-fisik seperti keramahan, layanan yang sesuai dengan syariat, serta suasana yang aman dan nyaman untuk keluarga Muslim (Henderson, 2016). Menurut laporan CrescentRating (2021), tren global menunjukkan adanya peningkatan signifikan permintaan pasar terhadap destinasi wisata halal seiring dengan bertambahnya populasi Muslim dan peningkatan kesadaran gaya hidup halal.

Wisata Halal Di Indonesia Dan Nusa Tenggara Barat (NTB)

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, memiliki potensi besar dalam mengembangkan wisata halal. Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya Pulau Lombok, menjadi salah satu destinasi utama dengan berbagai keunggulan, seperti kearifan lokal Islami, budaya yang mendukung gaya hidup halal, serta komitmen pemerintah daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal (Pemprov NTB, 2016). Pengakuan internasional yang diterima Provinsi Nusa Tenggara Barat, seperti penghargaan World's Best Halal Tourism Destination dan World's Best Halal Honeymoon Destination pada tahun 2015, memperkuat posisi Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai destinasi wisata halal unggulan (Kementerian Pariwisata, 2016).

Dampak Wisata Halal Terhadap Ekonomi Lokal

Wisata halal memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi lokal, di antaranya dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan sektor usaha kecil dan menengah (Silalahi et al., 2023). Menurut data Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat (2022), sektor pariwisata berkontribusi lebih dari 15% terhadap PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan sebagian besar didukung oleh segmen wisata halal. Dampak positif ini dirasakan tidak hanya di kawasan destinasi utama, tetapi juga di wilayah-wilayah penunjang yang menjadi bagian dari rantai pasok industri pariwisata.

Peran Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Dalam Mendukung Wisata Halal

Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) menjadi aktor penting dalam ekosistem wisata halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mereka menyediakan produk-produk halal seperti kuliner, kerajinan tangan, oleh-oleh khas daerah, serta layanan transportasi dan pemandu wisata yang sesuai syariah (Mudin & Huda, 2023). Keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) tidak hanya mendukung keberlangsungan sektor pariwisata, tetapi juga membantu pelestarian budaya lokal dan nilai-nilai Islami. Namun, tantangan yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) meliputi keterbatasan modal, akses terhadap pasar, dan proses sertifikasi halal yang kadang kompleks (Zitri et al., 2023).

Tantangan Dan Strategi Pengembangan Wisata Halal Di Nusa Tenggara Barat (NTB)

Pengembangan wisata halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain infrastruktur yang belum memadai di beberapa destinasi, keterbatasan sumber daya manusia yang paham tentang pelayanan halal, dan promosi yang belum optimal di pasar internasional (Nasution et al., 2023). Strategi yang perlu dilakukan mencakup peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan, penyediaan fasilitas halal di destinasi wisata, promosi melalui platform digital, serta kolaborasi dengan pihak swasta dan lembaga sertifikasi halal untuk memperkuat ekosistem wisata halal (Silalahi et al., 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) untuk menggali informasi mengenai peran wisata halal dalam meningkatkan ekonomi lokal dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) di Nusa Tenggara Barat tahun 2025. Metode ini dipilih karena memungkinkan penulis untuk menganalisis berbagai sumber literatur, baik berupa artikel ilmiah, buku, laporan pemerintah, dokumen kebijakan, maupun data statistik yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan kualitatif dianggap paling sesuai untuk memahami secara mendalam fenomena sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam konteks pengembangan wisata halal sebagai strategi pembangunan daerah.

Data sekunder yang dikumpulkan meliputi dokumen resmi pemerintah seperti Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, laporan tahunan Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta berbagai artikel jurnal yang membahas pengembangan wisata halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan dampaknya terhadap ekonomi lokal dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM). Selain itu, sumber-sumber berita terkini dan publikasi media online yang relevan juga dijadikan referensi untuk memperkaya analisis. Data dianalisis secara deskriptif, dengan penekanan pada interpretasi makna dan keterkaitan antar variabel yang mempengaruhi perkembangan wisata halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: pertama, peneliti mengidentifikasi dan memilih literatur yang relevan dengan topik penelitian. Kedua, literatur yang terpilih kemudian dikaji untuk menemukan tema-tema utama yang berkaitan dengan wisata halal, peran Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM), dan dampaknya terhadap ekonomi lokal. Ketiga, peneliti melakukan sintesis data dengan cara menghubungkan temuan dari berbagai literatur untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai kontribusi wisata halal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Validitas data dijaga dengan cara melakukan triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai referensi untuk memastikan konsistensi informasi. Selain itu, data yang digunakan juga dipilih dari sumber-sumber yang kredibel, seperti artikel ilmiah yang terindeks di jurnal bereputasi, laporan resmi pemerintah, dan dokumen kebijakan daerah. Hal ini dilakukan untuk menghindari bias interpretasi dan memastikan hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Batasan penelitian ini adalah fokus pada wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan penekanan pada Pulau Lombok sebagai pusat pengembangan wisata halal. Penelitian tidak mencakup wilayah lain secara mendetail karena karakteristik budaya, sosial, dan ekonomi di setiap daerah berbeda-beda. Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan data sekunder dan tidak melibatkan penelitian lapangan secara langsung, sehingga temuan lebih bersifat konseptual dan interpretatif berdasarkan data yang tersedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontribusi Wisata Halal Terhadap Ekonomi Lokal

Wisata halal telah memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat. Menurut Mudin dan Huda (2023), konsep wisata halal yang dikembangkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di angka 7 persen. Peningkatan jumlah wisatawan Muslim mendorong permintaan terhadap produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip halal, sehingga menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal. Hal ini mencakup penyediaan akomodasi ramah Muslim, restoran dengan sertifikasi halal, transportasi yang sesuai syariah, hingga penyediaan paket wisata yang mengedepankan nilai-nilai Islami. Kondisi ini memperluas jangkauan ekonomi daerah, bukan hanya di pusat kota, tetapi juga di kawasan pedesaan yang menjadi lokasi destinasi wisata.

Selain pertumbuhan PDRB, wisata halal juga menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Silalahi et al. (2023) menyebutkan bahwa sektor pariwisata halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat membuka peluang usaha di berbagai sektor pendukung, seperti kuliner, transportasi, pemandu wisata, hingga kerajinan tangan. Banyak

Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) lokal yang terlibat dalam penyediaan produk oleh-oleh halal, seperti makanan khas Lombok, kain tenun, dan kerajinan berbasis motif Islami. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara industri pariwisata halal dengan sektor Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak ekonomi lokal. Dampak positif ini juga menciptakan multiplier effect, di mana perputaran uang tidak hanya terjadi pada sektor pariwisata utama, tetapi juga mengalir ke berbagai lapisan masyarakat.

Peningkatan pendapatan masyarakat dari sektor wisata halal juga berdampak pada kesejahteraan sosial. Menurut Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat (2022), rata-rata pendapatan rumah tangga yang terlibat langsung dalam ekosistem wisata halal mengalami kenaikan signifikan, terutama di wilayah-wilayah destinasi utama seperti Senggigi, Mandalika, dan Sembalun. Tidak hanya dalam bentuk pendapatan langsung, kehadiran wisata halal juga mendorong perbaikan infrastruktur lokal, seperti pembangunan jalan, fasilitas umum, serta peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan akibat meningkatnya aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mendukung keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

Wisata halal juga memberikan kontribusi dalam memperkuat identitas budaya lokal. Menurut Battour dan Ismail (2016), destinasi wisata halal yang mengedepankan nilai-nilai syariah dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan Muslim, karena mereka merasa lebih nyaman dan aman dalam menikmati liburan sesuai keyakinannya. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, nilai-nilai Islam yang tercermin dalam budaya lokal, seperti tradisi sasak, kuliner halal, dan adat istiadat yang Islami, menjadi keunggulan tersendiri dalam menarik wisatawan. Identitas budaya ini tidak hanya menjadi daya tarik pasar, tetapi juga menjadi dasar dalam memperkuat keberlanjutan pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat agar tidak tergerus oleh arus globalisasi.

Dukungan regulasi dari pemerintah juga menjadi faktor penting dalam memastikan kontribusi wisata halal terhadap ekonomi lokal. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal menjadi payung hukum dalam pengembangan ekosistem pariwisata halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB, 2016). Kebijakan ini mendorong lahirnya berbagai inisiatif, seperti program sertifikasi halal untuk restoran dan hotel, pelatihan SDM pariwisata berbasis syariah, serta promosi destinasi halal di tingkat nasional maupun internasional. Dengan adanya kerangka regulasi yang jelas, pelaku usaha lokal dapat lebih percaya diri dalam mengembangkan bisnis mereka sesuai dengan standar halal yang diakui secara global.

Namun, kontribusi wisata halal terhadap ekonomi lokal tidak terlepas dari tantangan yang harus dihadapi. Menurut Zitri et al. (2023), beberapa kendala yang masih sering ditemukan di lapangan antara lain kurangnya infrastruktur penunjang di beberapa destinasi, kesenjangan pengetahuan pelaku usaha tentang standar halal, serta keterbatasan akses permodalan bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM). Oleh karena itu, upaya peningkatan kapasitas SDM, pembiayaan yang inklusif, serta digitalisasi promosi wisata halal menjadi langkah strategis untuk memperkuat dampak ekonomi wisata halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas, dan lembaga pendidikan juga sangat penting untuk menciptakan ekosistem wisata halal yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, wisata halal terbukti menjadi salah satu penggerak utama ekonomi lokal di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain memberikan kontribusi langsung terhadap pendapatan daerah, wisata halal juga menjadi instrumen penting dalam memberdayakan masyarakat lokal, terutama melalui penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) dan pelestarian budaya. Jika dikelola dengan baik, potensi wisata halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat terus berkembang sebagai salah satu destinasi unggulan di tingkat global, sekaligus memberikan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat lokal. Hal ini menjadi contoh bagaimana konsep pariwisata berbasis nilai-nilai Islam dapat diimplementasikan secara praktis untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Wisata Halal

Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat memainkan peran penting dalam mendukung wisata halal, terutama dalam penyediaan

kuliner halal, kerajinan tangan, dan layanan akomodasi. Namun, banyak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) yang masih menghadapi tantangan dalam memperoleh sertifikasi halal dan memahami standar layanan halal. Kementerian Agama mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) untuk melaksanakan sertifikasi halal bagi produknya, dengan memberikan berbagai kemudahan dalam proses sertifikasi. Hal ini penting mengingat wisatawan Muslim semakin selektif dalam memilih produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Sertifikasi halal tidak hanya menjadi syarat formalitas, tetapi juga menjadi nilai tambah dalam membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen Muslim (Kemenag RI, 2023).

Selain sertifikasi, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) melalui wisata halal juga mencakup pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Menurut Silalahi et al. (2023), banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang membutuhkan pelatihan terkait pengelolaan usaha halal, pengemasan produk, pemasaran digital, serta pemahaman tentang preferensi wisatawan Muslim. Program-program pelatihan ini biasanya dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat. Peningkatan literasi halal menjadi kunci utama dalam memastikan produk-produk yang dihasilkan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) memenuhi standar syariah sekaligus mampu bersaing di pasar global.

Pemerintah daerah juga berperan aktif dalam memberikan fasilitas pendukung bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) halal. Misalnya, Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Dinas Koperasi dan UMKM sering mengadakan bazar produk halal, festival kuliner halal, dan pameran kerajinan lokal yang ramah Muslim. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana promosi, tetapi juga membuka akses pasar yang lebih luas bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) lokal. Menurut Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat (2022), partisipasi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) dalam event pariwisata halal mampu meningkatkan pendapatan mereka hingga 30% dibandingkan dengan penjualan biasa. Dukungan fasilitas pemasaran seperti etalase digital melalui media sosial dan marketplace halal juga menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) berbasis halal.

Lebih jauh, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) dalam wisata halal turut menciptakan dampak sosial yang positif di masyarakat. Menurut penelitian Zitri et al. (2023), keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) dalam ekosistem wisata halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat mampu menciptakan lapangan kerja baru, khususnya bagi perempuan dan pemuda di daerah pedesaan. Banyak perempuan yang kini terlibat dalam produksi makanan halal, kerajinan tangan Islami, dan layanan homestay syariah, sehingga meningkatkan kontribusi ekonomi keluarga. Hal ini sejalan dengan prinsip inklusi sosial, di mana pemberdayaan ekonomi berbasis halal juga menjadi sarana pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan di masyarakat.

Meskipun demikian, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat juga dihadapkan pada sejumlah tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan akses permodalan. Menurut Nasution et al. (2023), banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) yang masih kesulitan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal, terutama untuk pengembangan usaha halal yang membutuhkan modal tambahan, seperti renovasi tempat usaha agar sesuai standar halal atau pengadaan bahan baku bersertifikat halal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, perbankan syariah, dan lembaga pendanaan mikro untuk menciptakan skema pembiayaan yang ramah bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) halal.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) melalui wisata halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat harus terus diperkuat agar dapat berkontribusi optimal terhadap perekonomian daerah. Kolaborasi multipihak—meliputi pemerintah, swasta, lembaga pendidikan, dan komunitas—diperlukan untuk menciptakan ekosistem halal yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Jika tantangan-tantangan seperti akses pasar, sertifikasi, dan permodalan dapat diatasi dengan baik, maka Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak hanya akan menjadi roda

penggerak ekonomi lokal, tetapi juga memiliki potensi besar untuk menembus pasar nasional bahkan internasional. Oleh karena itu, penguatan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) halal menjadi bagian integral dari pengembangan wisata halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat secara keseluruhan.

Tantangan Dalam Implementasi Wisata Halal

Meskipun memiliki potensi besar, pengembangan wisata halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat lokal tentang konsep wisata halal dan keterbatasan infrastruktur pendukung. Studi oleh Zitri et al. (2023) menunjukkan bahwa standar wisata halal masih ambigu, sehingga banyak pelaku usaha yang belum memahami standar tersebut. Misalnya, beberapa pemilik homestay atau restoran belum memahami pentingnya sertifikasi halal, tata cara pelayanan sesuai syariah, atau pengaturan fasilitas ibadah yang memadai bagi wisatawan Muslim. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi wisata halal dan kesiapan pelaku usaha di lapangan, yang berdampak pada rendahnya kualitas layanan wisata halal secara keseluruhan.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur pendukung juga menjadi masalah utama. Menurut Mudin dan Huda (2023), sebagian besar destinasi wisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terutama di daerah terpencil, masih minim fasilitas pendukung seperti mushola yang representatif, toilet bersih yang sesuai standar, serta akses transportasi yang ramah keluarga Muslim. Beberapa destinasi yang memiliki potensi besar, seperti Desa Sembalun atau Pantai Pink, belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung kenyamanan wisatawan Muslim. Hal ini menghambat upaya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan halal ke Nusa Tenggara Barat, meskipun daya tarik alam dan budaya sudah diakui luas.

Kebijakan pemerintah daerah yang belum optimal dalam implementasi wisata halal juga menjadi tantangan signifikan. Meskipun sudah ada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, penerapannya di tingkat teknis sering mengalami kendala. Menurut Silalahi et al. (2023), masih ada gap koordinasi antar dinas terkait, kurangnya pengawasan terhadap penerapan standar halal, serta minimnya evaluasi rutin terhadap program-program pengembangan wisata halal. Hal ini menyebabkan sebagian besar program hanya berjalan di atas kertas tanpa dampak nyata di lapangan. Untuk itu, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah daerah dalam memastikan kebijakan wisata halal tidak hanya sebagai slogan, tetapi juga terwujud dalam praktik.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terlatih di bidang wisata halal. Banyak pelaku usaha pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat, seperti pemandu wisata, pemilik homestay, dan pengelola restoran, belum mendapatkan pelatihan yang memadai terkait pelayanan wisata halal. Menurut penelitian oleh Nasution et al. (2023), mayoritas pelaku usaha masih mengandalkan pengalaman pribadi tanpa memahami standar pelayanan halal secara profesional. Akibatnya, pelayanan kepada wisatawan Muslim sering kali tidak konsisten, yang berpotensi menurunkan kepuasan dan kepercayaan wisatawan terhadap destinasi NTB sebagai destinasi wisata halal unggulan.

Kurangnya akses terhadap pembiayaan usaha juga menjadi tantangan utama dalam pengembangan wisata halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) yang ingin meningkatkan fasilitas usahanya sesuai standar halal, tetapi terkendala modal. Skema pembiayaan yang ramah bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) halal, seperti pembiayaan syariah, masih terbatas jangkauannya di daerah-daerah wisata Provinsi Nusa Tenggara Barat. Menurut Dinas Koperasi dan UMKM Nusa Tenggara Barat (2022), hanya sebagian kecil pelaku usaha pariwisata halal yang mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan syariah, sementara sebagian besar masih mengandalkan modal pribadi atau pinjaman informal. Hal ini menghambat inovasi dan pengembangan usaha di sektor wisata halal.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya promosi yang terarah terhadap pasar wisatawan Muslim global. Menurut Battour dan Ismail (2016), promosi destinasi halal harus dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan preferensi pasar Muslim, seperti melalui platform digital Islami, influencer Muslim, dan partisipasi dalam pameran wisata halal internasional. Sayangnya, strategi promosi wisata halal Nusa Tenggara

Barat masih terbatas pada promosi umum tanpa diferensiasi yang jelas dengan destinasi lain. Hal ini menyebabkan Provinsi Nusa Tenggara Barat belum sepenuhnya dikenal sebagai destinasi halal unggulan di pasar global, meskipun telah memperoleh sejumlah penghargaan internasional.

KESIMPULAN

Wisata halal memiliki peran strategis dalam meningkatkan ekonomi lokal dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan dukungan regulasi, peningkatan kapasitas pelaku usaha, dan pengembangan infrastruktur, wisata halal dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Namun, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mengatasi tantangan yang ada dan memastikan keberlanjutan pengembangan wisata halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Battour, M., & Ismail, M. N. (2016). Halal tourism: Concepts, practices, challenges, and future. *Tourism Management Perspectives*, 19, 150-154.
- Crescent Rating. (2021). *Global Muslim Travel Index 2021*.
- Dinas Koperasi dan UMKM NTB. (2022). *Laporan Tahunan UMKM Nusa Tenggara Barat Tahun 2022*. Mataram: Diskop UKM NTB.
- Dinas Pariwisata NTB. (2022). *Laporan Kinerja Sektor Pariwisata Nusa Tenggara Barat Tahun 2022*. Mataram: Dispar NTB.
- El-Gohary, H. (2016). Halal tourism, is it really halal?. *Tourism Management Perspectives*, 19, 124-130.
- Fathoni, M. A. (2020). Potret industri halal Indonesia: Peluang dan tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 428-435.
- Fitri, E. (2024). *Peran Produk Pembiayaan Pada Bank Aceh Syariah Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Mendukung Sektor Wisata Halal Di Kota Sabang* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Gustina, G., Yenida, Y., & Novadilastri, N. (2019). Potensi Wisata Halal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Poli Bisnis*, 121-132.
- Henderson, J. C. (2016). Muslim travellers, tourism industry responses and the case of Japan. *Tourism Recreation Research*, 41(3), 339-347.
- Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI). (2023). *Laporan Peningkatan Sertifikasi Halal Bagi UMKM di Indonesia*. Jakarta: Kemenag RI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). *Kemenag Dorong Penguatan Pariwisata Halal di NTB melalui Produk Halal UMK*.
- Kementerian Pariwisata. (2016). *Laporan Penghargaan Wisata Halal NTB*. Jakarta: Kemenpar RI.
- Mudin, Q., & Huda, N. (2023). Peran Wisata Halal dalam Mempercepat Pembangunan Ekonomi Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Nusa Tenggara Barat. *Asyafina Journal: Jurnal Akademi Pesantren*, 2(1), 121-131.
- Nasution, M. S., Prayitno, B., & Rois, I. (2020). Pengembangan Wisata Halal untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kota Mataram. *Istinbath*, 19(2).
- Pelu, I. E. A., Kurniawan, R., & Akbar, W. (2019). Pengembangan wisata syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (studi wisata halal Nusa Tenggara Barat).
- Pemprov NTB. (2016). *Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal*. Mataram: Biro Hukum Pemprov NTB.
- Sari, Y., Ridwansyah, R., & Anggraeni, E. (2024). Analisis SWOT Pengembangan Wisata Halal dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Lampung. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(1), 290-304.

-
- Silalahi, P. R., Imsar, I., & Fattah, A. (2024). Industri halal sebagai solusi peningkatan pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 1444-1454.
- Subarkah, A. R. (2018). Potensi dan prospek wisata halal dalam meningkatkan ekonomi daerah (studi kasus: Nusa Tenggara Barat). *Sospol*, 4(2), 49-72.
- Yusuf, M. Y., & Maulana, H. (2022). Model Pengembangan Wisata Halal Berbasis Masjid di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1115-1123.
- Zitri, I., Gushadi, A., & Subandi, A. (2023). Pariwisata Halal Di Nusa Tenggara Barat: Implementasi Dalam Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. *Journal of Social and Policy Issues*, 113-120.